

SKRIPSI

**EVALUASI DAN PELAPORAN PEMELIHARAAN JALAN DI DINAS
PEKERJAAN UMUM DI KABUPATEN TAKALAR**

KRISDAYANTI

Nomor Stambuk : 105610477013



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**

**EVALUASI DAN PELAPORAN PEMELIHARAAN JALAN DI DINAS
PEKERJAAN UMUM DI KABUPATEN TAKALAR**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh

KRISDAYANTI

Nomor Stambuk : 105610477013

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Evaluasi dan Pelaporan Pemeliharaan Jalan di
Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Takalar

Nama Mahasiswa : Krisdayanti

Nomor Stambuk : 105610 4770 13

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. H. Muhlis Madani, M.Si

Pembimbing II



Dr. Abdi, M.Pd

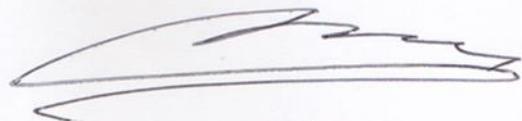
Mengetahui :

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara



Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan / undangan menguji skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor Surat : 0318/FSP/A.I-VIII/II/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018.

TIM PENILAI

Ketua



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Sekretaris



Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

Penguji :

1. **Dr. H. Muhlis Madani, M.Si (Ketua)**



(.....)

2. **Dr. Abdul Mahsyar, M.Si**



(.....)

3. **Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si**



(.....)

4. **Dr. Abdi, M.Pd**



(.....)

PERYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa :Krisdayanti

Nomor Stambuk :105610477013

Program Studi :Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari prnyataan ini tidak benar,maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 27 february 2018

Yang Menyatakan,

Krisdayanti

ABSTRAK

Krisdayanti, tahun 2018, Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Pemeliharaan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Di Kabupaten Takalar (dibimbing oleh Muhlis Madani dan Abdi)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pekerjaan Umum dan Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Takalar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) secara umum aktivitas pemeliharaan jalan Kabupaten Takalar telah dilaksanakan namun masih belum maksimal dan dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak hambatan. Sehingga hasil yang diharapkan belum bisa tercapai secara penuh, (2) Berdasarkan hasil di lapangan factor dominan yang menghambat tercapainya tujuan terletak pada minimnya sumber daya manusia yang dimiliki, manajemen waktu tahun anggaran yang tidak terintegrasi dengan kondisi di lapangan. Namun dibalik itu sebagian masyarakat menganggap bahwa pemerintah setempat telah menunjukkan respon yang cukup maksimal dalam pemeliharaan jalan di Kabupaten Takalar. Dukungan masyarakat pulalah yang menjadi motivasi bagi pemerintah setempat.

Kata Kunci : Evaluasi dan Pelaporan, Pemeliharaan Jalan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil alamien, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Evaluasi dan Pelaporan Pemeliharaan Jalan di Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Takalar ”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara, Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Muhlis Madani, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Abdi, M.Pd selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.sos., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa meluangkan waktu

untuk memberi bekal ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di lembaga ini.

5. Kedua Orang tua saya, Bapak Alm. Ali Muddin dan Ibu Nursida Razak yang senantiasa memberikan semangat ajaran dan bantuannya baik berupa moril maupun materil.
6. Saudara saya, Salmawati dan Ardiansyah yang senantiasa memberikan nasehat, dukungan dan semangat kepada penulis selama dalam penyusunan skripsi.
7. Terima kasih untuk Muh. Syukri, Laksmi Afwani Fadhila, Ardiyanti arifin, Diani Safitri, Muh. Iksan, dan Muldiana yang telah membatu dalam penulisan Skripsi ini. Sera rekan-rekan seperjuanganku dan teman-teman satu kader 013 yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan, baik moril maupun materil.

Demikian kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi yang membutuhkan.

Makassar, 27 Februari 2018

Krisdayanti

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Pengajuan Skripsi	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Penerimaan Tim.....	iv
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Implementasi	8
1. Tugas Pokok dan Fungsi Pekerjaan Umum	
B. Konsep Pekerjaan Umum	13
1. Fungsi Dinas Pekerjaan Umum	13
2. Tugas Pokok Pekerjaan Umum	13
C. Konsep Evaluasi dan Pelaporan	14

D. Konsep Pemeliharaan Jalan	20
E. Kerangka Pikir	22
F. Fokus Penelitian	23
G. Deskripsi Fokus Penelitian	23

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	25
B. Jenis Dan Tipe Penelitian	25
C. Sumber Data	25
D. Informan Penelitian	26
E. Teknik Pengumpulan Data	27
F. Teknik Analisis Data	28
G. Keabsahan Data	29

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Profil Dinas Pekerjaan Umum	32
B. Evaluasi dan Pelaporan Dalam Pemeliharaan Jalan	45
C. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Pemeliharaan jalan di Kabupaten Takalar	61

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	64
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Tabel Informan Penelitian

Tabel 2: Tabel perkerasan aktivitas pemeliharaan jalan di Kabupaten Takalar

Tabel 3: penanggungjawab pemeliharaan jalan di Kabupaten Takalar

Tabel 4: Data Jalan Berdasarkan Kerusakan

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

Gambar 2. Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan tuntutan kemajuan serta perkembangan peran dan fungsi pemerintahan dibidang *public service* atau pelayanan publik maka untuk mengoptimalkan peran dan fungsi tersebut, pemerintah perlu membentuk susunan organisasi dan tata kerja dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi dan industri yang semakin tahun semakin berkembang, sehingga keberadaan jalan raya sangat diperlukan untuk menunjang laju pertumbuhan ekonomi, seiring dengan meningkatnya kebutuhan sarana transportasi yang dapat menjangkau daerah-daerah terpencil yang merupakan prasarana transportasi darat yang memegang peranan penting dalam sektor perhubungan, terutama untuk kesinambungan distribusi barang dan jasa, serta masyarakat dan untuk pengembangan kapasitas maupun kuantitas kendaraan yang menghubungkan kota-kota antar provinsi dan terbatasnya dana untuk pembangunan jalan serta belum optimalnya pengoperasian prasarana lalu lintas yang ada, merupakan persoalan utama di indonesia dan di banyak negara-negara yang sedang berkembang. Perencanaan peningkatan jalan merupakan salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan lalu lintas.

Cepat atau lambat jalan akan mengalami penurunan tingkat pelayanan. Menurunnya tingkat pelayanan jalan di tandai dengan adanya kerusakan pada

jalan, kerusakan yang terjadi juga bervariasi pada setiap segmen di sepanjang ruas jalan apabila dibiarkan dalam jangka waktu yang lama, maka akan semakin memperburuk kondisi jalan itu sendiri dan dapat mempengaruhi keamanan, kenyamanan, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Umumnya jalan direncanakan memiliki umur rencana pelayanan tertentu sesuai kebutuhan dan kondisi lalu lintas yang ada, misalnya 10 sampai dengan 20 tahun, dengan harapan bahwa jalan masih tetap dapat melayani lalu lintas dengan tingkat pelayanan pada kondisi yang baik, untuk mencapai pelayanan pada kondisi yang baik selama umur rencana tersebut diperlukan adanya upaya pengawasan dan pemeliharaan jalan secara berkelanjutan.

Kondisi jalan di Indonesia saat ini masih banyak kekurangan, Direktorat Jendral Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Djoko Murjanto mengakui bahwa jalan di Indonesia belum sepenuhnya dalam kondisi mantap. Namun, kata dia, dari data yang dimilikinya, proporsi jalan rusak semakin minim. Pemerintah mengklaim kondisi jalan yang rusak ringan 0,8 persen dari keseluruhan jalan nasional. Sedangkan kondisi jalan yang masuk kategori rusak berat sebesar 9,2 persen dari panjang jalan nasional keseluruhan 38.500 kilometer (<http://www.merdeka.com.html> diakses pada tanggal 09 Maret 2014).

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan yang disebutkan pula mengenai pemeliharaan jalan di pasal 1 ayat 8, serta pembagian wewenang Pemerintah yang tercantum pada pasal 59 ayat 1. Selain itu, adanya pengkajian, penelitian dan pengembangan di bidang jalan yang mencakup aspek perencanaan, pemrograman, perencanaan teknis,

pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan, teknologi bahan dan alat, tata laksana serta pengawasan dan pengendalian tercantum pada pasal 82 ayat 3 dan dijelaskan kembali mengenai pembangunan jalan dan program penanganan jaringan jalan pada pasal 83 dan pasal 84 ayat 3. Serta dijelaskan lebih detail mengenai pengoperasian dan pemeliharaan jalan pada Paragraf 6 pasal 96-pasal 101.

Dinas Pekerjaan umum (PU) yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yakni kementerian pekerjaan umum, kehadirannya sangat memberi warna terhadap pelayanan publik. Dinas Pekerjaan Umum (PU) adalah perangkat daerah yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan otonomi daerah, desentralisasi dalam bidang Pekerjaan Umum.

Konteks otonomi daerah yang ditandai dengan kemampuan self supporting organisasi daerah, instalasi Dinas Pekerjaan Umum mempunyai peran sangat penting sebagai instansi yang melaksanakan dan mengawal pembangunan infrastruktur di daerah khususnya di Kabupaten Takalar. Infrastruktur yang baik dan lengkap akan memperlancar perekonomian di daerah, begitu juga sebaliknya buruknya infrastruktur akan menghambat perekonomian sehingga pembangunan di daerah menjadi lambat dan tidak berkembang. Mengingat pentingnya peran dan fungsi instansi Dinas Pekerjaan Umum (PU) seperti yang telah diuraikan diatas, maka instansi ini oleh pemerintah daerah diutamakan dalam pembentukan susunan organisasi didaerahnya.

Bidang bina marga memfokuskan diri pada jalan dan jembatan serta bangunan pelengkap, yang menjadi objek vital kebutuhan infrakstruktur dasar

masyarakat. Karena itu, sejumlah ruas jalan dan jembatan telah dibangun oleh dinas Pekerjaan Umum dengan tujuan untuk melengkapi infrastruktur dasar. Kehadiran infrastruktur jalan dan jembatan ini akan membuka akses dari keterisoliran dan mendorong perekonomian kawasan.

Pembangunan infrastruktur pelayanan publik ini di sejalankan dengan strategi percepatan pertumbuhan ekonomi kawasan. Tujuannya tentu tidak lain memastikan roda perekonomian bergerak cepat yang sejumlah proyek jalan dan jembatan telah berhasil diselesaikan oleh dinas Pekerjaan Umum.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, bidang bina Marga mempunyai tugas yaitu (1) Penyusunan rencana teknis, program pembinaan dan bimbingan teknis di bidang Bina Marga, (2) Pengawasan, pengendalian, dan pelaksanaan Pekerjaan Bina Marga, (3) Perizinan dan pengawasan pemanfaatan jalan beserta utilitasnya, (4) Penanggulangan jalan dan jembatan akibat bencana alam, (5) Pengumpulan data akibat jembatan rusak dan bencana alam, (6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

Pemerintah Kabupaten atau kota di seluruh Indonesia khususnya di Kabupaten Takalar wajib melaksanakan fungsi undang-undang No.32 tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah dan undang-undang No.33 tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan antara pusat dan pemerintah daerah. Kebijakan pemerintah pusat tersebut bermula dari suatu keinginan untuk memperbaiki proses partisipasi pembangunan daerah, dari yang bersifat Top-Down menjadi Bottom-Up. Daerah kabupaten atau kota daerah dituntut untuk dapat menggali dan mengembangkan

potensi sumberdaya alam dan sumber daya manusia guna dapat melaksanakan pembangunan di daerahnya.

Namun pada kenyataannya, pelaksanaan fungsi Dinas Pekerjaan Umum (PU) khususnya di Kabupaten Takalar belum maksimal. Karena terdapat beberapa jalan penghubung antara kecamatan yang satu dengan kecamatan yang lain rusak parah akibat perubahan iklim dan tidak adanya perbaikan jalanan. Dinas PU hanya melaksanakan sebagian kecil dari fungsinya. Hanya jalan-jalan yang berada di daerah kota saja atau jalanan provinsi saja yang dibangun terus menerus tanpa memperhatikan jalanan yang ada dibagian pedesaan.

Kondisi jalan alternatif Gowa-Takalar tepatnya di Jl. Poros Cadika – Lassang Barat Kecamatan Polobangkeng Utara Takalar, sangat memprihatinkan. Peralnya jalan yang setiap hari dilalui ratusan kendaraan roda empat maupun roda dua tersebut puluhan tahun tidak pernah mendapat perhatian pemerintah. Padahal jalan tersebut merupakan jalur terdekat yang menghubungkan antara Kabupaten Takalar di bagian kecamatan Polobangkeng Utara dan Kabupaten Gowa dibagian Kecamatan Bajeng. Sebelumnya, jalan yang rusak tersebut di aspal namun hanya sekitar 1 km saja dan selebihnya sekitar 10 km merupakan jalan yang rusak yang dipenuhi batu. jalan tersebut hanya ditimbuni pasir yang bercampur batu ketika terdapat bagian jalan yang berlubang sehingga ketika hujan tiba jalan tersebut menjadi licin dan sebaliknya ketika musim kemarau tiba akan menjadi sangat berdebu (Tribun Takalar.com).

Merujuk dari permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis proposal tentang pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Pemeliharaan Jalan di Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar khususnya di Jl. Poros Cadika – Lassang Barat Kecamatan Polongbangkeng Utara yang kemudian diteruskan untuk menjadi skripsi dengan judul “Evaluasi dan Pelaporan Pemeliharaan Jalan di Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Takalar”.

B. Rumusan masalah

Dari uraian latar belakang di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana evaluasi dan pelaporan pemeliharaan jalan di Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Takalar?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi evaluasi dan pelaporan pemeliharaan jalan di Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Takalar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemeliharaan jalan oleh Dinas Pekerja Umum di Kabupaten Takalar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi evaluasi dan pelaporan pemeliharaan jalan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar.

D. Manfaat Penelitian

Sementara jika kita melihat apa yang menjadi latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian maka yang menjadi kegunaan dalam penelitian adalah:

1. Manfaat akademik

Bagaimana manfaat akademis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian ini bisa menjadi referensi dan masukan bagi mahasiswa yang melakukan penelitian terhadap pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemeliharaan jalan.

2. Manfaat praktis

Bagaimana manfaat praktis yang dapat diambil dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan alternatif atau pertimbangan, khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum dalam Evaluasi dan Pelaporan pemeliharaan jalan di Kabupaten Takalar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Implementasi

Pelaksanaan diartikan sebagai perihal tentang pembuatan dan usaha tertentu. Lebih jauh tentang pelaksanaan sebagai suatu proses yang dikatakan oleh grindel, (Handayani, 2002), menjelaskan bahwa proses implementasi baru dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan program kerja, telah disusun, dan telah disiapkan dan disalurkan untuk pencapaian tujuan atau sasaran tersebut.

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Murtir menyatakan bahwa, implementasi atau pelaksanaan adalah aktivitas-aktivitas atau usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan atau alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana melaksanakannya, kapan waktu berakhirnya dan bagaimana cara yang harus dilakukan (Murtir, 2008).

Pelaksanaan merupakan arti dari implementasi-implementasi merupakan suatu tindak lanjut dari suatu program yang ditetapkan berlaku dan dirumuskan.

Dengan demikian fokus perhatian implementasi yakni kesedian-kesediaan yang ditimbulkan sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan ditetapkan.

Kemudian Siagian, menyatakan bahwa jika suatu rencana yang terealisasi telah tersusun dan jika program kerja yang “achievement oriented” telah dirumuskan maka kini tinggal pelaksanaannya. Lebih lanjut, Siagian (1984), mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan ada beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Membuat rencana detail, artinya adalah rencana strategis (jangka panjang) menjadi rencana teknis (jangka pendek) dan mengorganisis sumber-sumber dan staf dan selanjutnya menyusun peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur tertentu.
2. Pemberian tugas artinya merubah rencana teknis menjadi rencana praktis, dan tujuan selanjutnya melakukan pembagian tugas-tugas dan sumber-sumber
3. Monitor artinya pelaksanaan dan kemajuan pelaksanaan tugas jangan sampai terjadi hal-hal yang berhubungan dengan rencana praktis. Dalam hal ini diperlukan untuk memeriksa hasil-hasil yang dicapai.
4. Review artinya pelaporan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan, analisi pelaksanaan tugas-tugas, pemeriksaan kembali dan penyusunan jadwal waktu pelaksanaan selanjutnya dalam laporan diharapkan adanya saran dan perbaikan bila ditemui adanya perbedaan dan penyimpangan.
5. Implementasi adalah aktivitas atau usaha-usaha yang dilakukan untuk melakukan secara rencana dan kebijaksanaan dan telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi kebutuhan dimana tempat pelaksanaan, kapan

waktu pelaksanaan, kapan waktu dan dimana berakhirnya dan bagai mana cara yang harus dilakukan.

Proses implementasi dilakukan dengan sekurang-kurangnya 3 unsur yaitu :

1. Adanya program kegiatan/kebijaksanaan yang dilaksanakan
2. Target group/kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan harapan akan menerima manfaat dari program tersebut.
3. Untuk melaksanakan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, pengawasan dari proses pelaksanaan.

Berhasilnya dari suatu proses menurut George. C. Edward III 1987, dalam Nawawi, 2009, syarat penting bagi berhasilnya suatu proses implementasi kebijakan yang dilaksanakan, faktor tersebut:

1. Komunikasi, yaitu suatu program akan berjalan baik apabila baik dalam pelaksanaan, ini menyangkut proses penyampaian informasi, komunikasi memegang peranan penting hingga berlangsungnya proses koordinasi dan pelaksanaannya yang akan mengakibatkan timbulnya pemahaman yang menyeluruh mengenai pentingnya program dan kesepakatan terhadap tujuan dan sasaran yang ingin dicapai
2. Sumber daya, hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf (jumlah dan mutu) untuk informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, kewenangan cukup guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.
3. Disposisi sikap, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan dari program dalam hal ini terutama adalah aparatur pelaksana.

4. Struktur birokrasi, terdapatnya SOP (standar operasional prosedur) yang mengatur tata aliran.

Keempat faktor diatas dipandang mempengaruhi keberhasilan replikasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara satu faktor dengan faktor yang lain. Berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan di Indonesia Kartasmita (1996), hal berupa menyatakan pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah adalah tugas manajemen pembangunan untuk menjamin bahwa proyek-proyek pembangunan yang secara fisik dilaksanakan atau dibiayai oleh anggaran pemerintah, berjalan seperti yang dikehendaki dalam mencapai sasaran seperti yang direncanakan dengan cara seefisien mungkin.

1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum

Tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi organisasi. Setiap pegawai seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rincian tugas-tugas tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan konkrit sesuai dengan kemampuan tuntutan masyarakat.

Tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara Tugas pokok dan Fungsi. Dalam peraturan perundang-undangan pun sering disebutkan bahwa suatu organisasi menyelenggarakan

fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pokok. Berikut uraian tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum:

a. Tugas pokok

Tugas pokok dimana pengertian tugas itu sendiri telah dijelaskan sebelumnya adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan. Adapun definisi tugas menurut para ahli, yaitu menurut Dale Yoder dalam Moekijat (1998), tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau unsur dalam suatu jabatan. Sementara menurut Stone dalam Moekijat (1998), mengemukakan bahwa suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Definisi lainnya menilai bahwa tugas merupakan suatu kegiatan spesifik yang dijalankan dalam organisasi yaitu menurut John dan Mary Miner dalam Moekijat (1998), menyatakan bahwa tugas adalah suatu bagian atau satu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa tugas pokok adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi tujuan tertentu.

b. Fungsi

Pengertian fungsi menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna pekerjaan yang dilakukan. Adapun menurut para

ahli, definisi fungsi yaitu menurut The Liang Gie dalam Nining Haslinda Zainal (Skripsi “analisis kesesuaian tugas pokok dan fungsi dengan kompetensi pegawai pada sekretariat pemerintah kota makassar” 2008), fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya. Definisi tersebut memiliki persepsi yang sama dengan definisi fungsi menurut Sutarto dan Nining Haslinda Zainal (2008), yaitu fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seseorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya. Sedangkan pengertian singkat dari definisi fungsi menurut Moekijat dalam Nining Haslinda Zainal (2008), yaitu fungsi adalah sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu.

Berdasarkan pengertian masing-masing dari kata tugas pokok dan fungsi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa definisi tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) tersebut adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh para pegawai yang memiliki aspek khusus serta saling berkaitan satu sama lain menurut sifat atau pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tertentu dalam organisasi.

B. Konsep Pekerjaan Umum (PU)

a. Fungsi Dinas Pekerjaan Umum

Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata

Kerja Departemen Pasal 36 Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan urusan pemerintah dibidang permukiman dan prasarana wilayah termasuk pengembangan konstruksi
2. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas, serta pelayanan administrasi Departemen
3. Pelaksanaan dan penelitian bidang permukiman pengembangan terapan serta pendidikan dan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan dan prasarana wilayah.
4. Pelaksanaan pengawasan fungsional.

b. Tugas Pokok Pekerjaan Umum

Bidang bina marga memfokuskan diri pada jalan dan jembatan serta bangunan pelengkap, yang menjadi objek vital kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat. Karena itu, sejumlah ruas jalan dan jembatan telah dibangun oleh dinas Pekerjaan Umum dengan tujuan untuk melengkapi infrastruktur dasar. Kehadiran infrastruktur jalan dan jembatan ini akan membuka akses dari keterisoliran dan mendorong perekonomian kawasan.

Pembangunan infrastruktur pelayanan publik ini di sejajarkan dengan strategi percepatan pertumbuhan ekonomi kawasan. Tujuannya tentu tidak lain memastikan roda perekonomian bergerak cepat yang sejumlah proyek jalan dan jembatan telah berhasil diselesaikan oleh dinas Pekerjaan Umum.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, bidang bina Marga mempunyai tugas:

1. Penyusunan rencana teknis, program pembinaan dan bimbingan teknis dibidang Bina Marga.
2. Pengawasan, pengendalian, dan pelaksanaan pekerjaan Bina Marga.
3. Perizinan dan pengawasan pemanfaatan jalan beserta utilitasnya.
4. Penanggulangan jalan dan jembatan akibat bencana alam.
5. Pengumpulan data akibat jembatan rusak dan bencana alam
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas

C. Konsep Evaluasi dan Pelaporan

Evaluasi adalah proses mendeskripsikan, mengumpulkan dan menyajikan suatu informasi yang bermanfaat untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Tujuan evaluasi disini adalah untuk menghimpun informasi yang dijadikan dasar untuk mengetahui taraf kemajuan, perkembangan, dan pencapaian. Evaluasi merupakan proses mempertimbangkan makna, keefektifan, ketetapan berdasar pada kriteria atau tujuan, atau proses pemberian nilai atas sesuatu untuk mengambil keputusan. Gronlund (1985), berpendapat evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan, sampai sejauh mana tujuan program telah tercapai. Sedangkan Endang Purwanti (2008), berpendapat bahwa evaluasi adalah proses pemberian makna atau penetapan kualitas hasil pengukuran dengan cara membandingkan angka hasil pengukuran tersebut dengan kriteria tertentu.

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa evaluasi adalah pemberian nilai terhadap kualitas sesuatu. Selain dari itu, evaluasi juga dipandang sebagai proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan

untuk membuat alternatif-alternatif keputusan. Dengan demikian, Evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauhmana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai (Purwanto, 2002). Berdasarkan hal tersebut, dibawah ini dijelaskan lima model evaluasi yang biasanya sering digunakan yaitu:

- 1) Model Evaluasi CIPP
- 2) Model Evaluasi UCLA
- 3) Model Evaluasi Brinkerhoff
- 4) Model Evaluasi Stake atau model countenance
- 5) Model Evaluasi Metfessel dan Michael

Berikut uraian dari kelima model evaluasi di bawah ini :

1. Model Evaluasi CIPP

Model evaluasi CIPP yang dikemukakan oleh Stufflebeam & Shinkfield (1985), adalah sebuah pendekatan evaluasi yang berorientasi pada pengambil keputusan (*a decision oriented evaluation approach structured*) untuk memberikan bantuan kepada pengambil keputusan. Stufflebeam mengemukakan bahwa hasil evaluasi akan memberikan alternatif pemecahan masalah bagi para pengambil keputusan. Model evaluasi CIPP ini terdiri dari 4 huruf yang diuraikan sebagai berikut :

- a. *Context evaluation to serve planning decision*. Seorang evaluator harus cermat dan tajam memahami konteks evaluasi yang berkaitan dengan merencanakan keputusan, mengidentifikasi kebutuhan, dan merumuskan tujuan program.

- b. *Input Evaluation structuring decision*. Segala sesuatu yang berpengaruh terhadap proses pelaksanaan evaluasi harus disiapkan dengan benar. Input evaluasi ini akan memberikan bantuan agar dapat menata keputusan, menentukan sumber-sumber yang dibutuhkan, mencari berbagai alternatif yang akan dilakukan, menentukan rencana yang matang, membuat strategi yang akan dilakukan dan memperhatikan prosedur kerja dalam mencapainya.
- c. *Process evaluation to serve implementing decision*. Pada evaluasi proses ini berkaitan dengan implementasi suatu program. Ada sejumlah pertanyaan yang harus dijawab dalam proses pelaksanaan evaluasi ini. Misalnya, apakah rencana yang telah dibuat sesuai dengan pelaksanaan di lapangan? Dalam proses pelaksanaan program adakah yang harus diperbaiki? Dengan demikian proses pelaksanaan program dapat dimonitor, diawasi, atau bahkan diperbaiki.
- d. *Product evaluation to serve recycling decision*. Evaluasi hasil digunakan untuk menentukan keputusan apa yang akan dikerjakan berikutnya. Manfaat model ini untuk pengambilan keputusan (*decision making*) dan bukti pertanggung jawaban (*accountability*) suatu program kepada masyarakat. Tahapan evaluasi dalam model ini yakni penggambaran (*delineating*), perolehan atau temuan (*obtaining*), dan menyediakan (*providing*) bagi para pembuat keputusan.

2. Model Evaluasi UCLA

Menurut Alkin (1969), evaluasi adalah suatu proses meyakinkan keputusan, memilih informasi yang tepat, mengumpulkan, dan menganalisa informasi sehingga dapat melaporkan ringkasan data yang berguna bagi pembuat keputusan dalam memilih beberapa alternatif. Ia mengemukakan lima macam evaluasi yakni :

- a. Sistem *assessment*, yaitu memberikan informasi tentang keadaan atau posisi sistem.
- b. Program *planning*, membantu pemilihan program tertentu yang mungkin akan berhasil memenuhi kebutuhan program.
- c. Program *implementation*, yang menyiapkan informasi apakah program sudah diperkenalkan kepada kelompok tertentu yang tepat seperti yang direncanakan?
- d. Program *improvement*, yang memberikan informasi tentang bagaimana program berfungsi, bagaimana program bekerja, atau berjalan? Apakah menuju pencapaian tujuan, adakah hal-hal atau masalah-masalah baru yang muncul tak terduga?
- e. Program *certification*, yang memberi informasi tentang nilai atau guna program.

3. Model Evaluasi Brinkerhoff

Brinkerhoff & Cs. (1983), mengemukakan tiga golongan evaluasi yang disusun berdasarkan penggabungan elemen-elemen yang sama, seperti evaluator-evaluator lain, namun dalam komposisi dan versi mereka sendiri sebagai berikut :

- a. *Fixed vs Emergent Evaluation Design*. Dapatkah masalah evaluasi dan kriteria akhirnya dipertemukan? Apabila demikian, apakah itu suatu keharusan? Belum lengkap penjelasannya
- b. *Formative vs Summative Evaluation*. Apakah evaluasi akan dipakai untuk perbaikan atau untuk melaporkan kegunaan atau manfaat suatu program? Atau keduanya?
- c. *Experimental and Quasi Experimental Design vs Natural/ Unobtrusive Inquiry*. Apakah evaluasi akan melibatkan intervensi ke dalam kegiatan program/mencoba memanipulasi kondisi, orang diperlakukan, variabel dipengaruhi dan sebagainya, atau hanya diamati, atau keduanya?

4. Model Evaluasi Stake atau model Countenance

Menurut model '*Countenance*', penilaian harus mengandung langkah-langkah berikut : menerangkan program (melaporkan keterangan tersebut kepada pihak yang berkepentingan), mendapatkan dan menganalisis judgment (melaporkan kembali hasil analisis kepada klien). Seterusnya, model responsif mencadangkan perhatian yang terus menerus oleh penilai dan semua pihak yang terlibat dengan penilaian. Model Evaluasi Stake (1967), merupakan analisis proses evaluasi yang membawa dampak yang cukup besar dalam bidang ini, meletakkan dasar yang sederhana namun merupakan konsep yang cukup kuat untuk perkembangan yang lebih jauh dalam bidang evaluasi. Stake menekankan pada dua jenis operasi yaitu deskripsi (*descriptions*) dan pertimbangan (*judgments*) serta membedakan tiga fase dalam evaluasi program yaitu : Persiapan atau Pendahuluan, Proses atau transaksi, Keluaran atau hasil.

5. Model Evaluasi Metfessel dan Michael

Metfessel dan Michael (1967), dapat digunakan oleh guru dan evaluator program. Dalam strategi model Metfessel dan Michael terdapat delapan langkah yaitu :

- a. Keterlibatan masyarakat (*envalvement of the community*) yakni : orang tua, ahli-ahli pendidikan dan peserta didik
- b. Pengembangan tujuan dan memilih tujuan menurut skala prioritas.
- c. Menterjemahkan tujuan menjadi bentuk tingkah laku dan mengembangkan pengajaran.
- d. Mengembangkan metode untuk mengukur dan mengevaluasi pencapaian tujuan.
- e. Menyusun dan mengadministrasi ukuran untuk mengevaluasi pencapaian tujuan
- f. Menganalisis hasil pengukuran
- g. Menginterpretasi dan mengevaluasi data
- h. Menyusun rekomendasi untuk mengembangkan pengajaran

Metode ini dilengkapi dengan instrumen pengumpulan data, lengkap dengan kriteria-kriteria yang dapat digunakan untuk mengevaluasi sebuah proyek atau kegiatan program. Seperangkat instrumen tersebut meliputi : tes, angket, check list, dan sebagainya serta cara-cara lain untuk menghimpun data penunjang.

D. Konsep Pemeliharaan Jalan

Dalam Pemeliharaan Jalan, konsep mengenai jalan merupakan konsep utama dalam penelitian ini. Menurut Wignall (1999), salah satu bagian dari sistem transportasi yang merupakan prasarana umum/infrastruktur adalah jalan, yang didefinisikan sebagai jalur dimana masyarakat mempunyai hak untuk melewatinya tanpa diperlukannya izin khusus untuk itu. Maka dari itu, perlu adanya pemeliharaan untuk tetap menjaga kenyamanan masyarakat. Menurut Jay Heizer dan Barry Render (2001), Pemeliharaan adalah “ *all activities involved in keeping a system's equipment in working order*” yang berarti bahwa pemeliharaan adalah segala kegiatan yang di dalamnya adalah untuk menjaga sistem peralatan agar bekerja dengan baik. Selain itu, pendapat yang sama juga disampaikan oleh Sofyan Assauri (2004), bahwa Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau menjaga fasilitas/peralatan pabrik dan mengadakan perbaikan atau penyesuaian/penggantian yang diperlukan agar supaya terdapat suatu keadaan operasi produksi yang memuaskan sesuai dengan apa yang direncanakan.

Pengelolaan pemeliharaan jalan bukanlah pekerjaan yang mudah, lebih-lebih pada saat kondisi jalan tidak baik serta beban kendaraan yang cenderung jauh melampaui batas. Pelaksanaan pemeliharaan jalan dilaksanakan berdasarkan pada rencana pemeliharaan jalan dengan wajib memperhatikan keselamatan pengguna jalan dan kelancaran lalu lintas dengan penempatan rambu lalu lintas secara jelas, aman dan stabil.

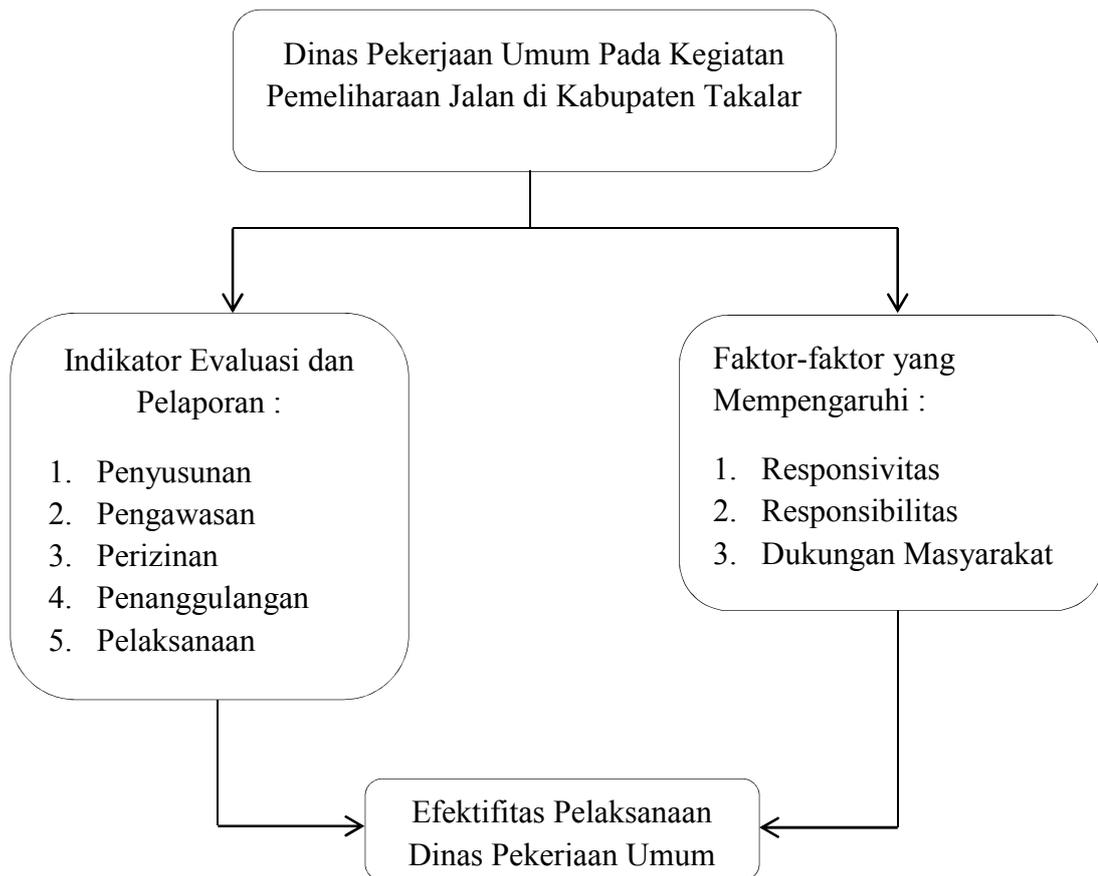
Pemeliharaan jalan yang dimaksud dalam penelitian ini. Menurut Mahmud dan kawan-kawan rencana pemeliharaan jalan meliputi Sistem Informasi, Sistem Manajemen Aset, dan rencana penanganan pemeliharaan jalan yang meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan rehabilitasi (2002:15). Pemeliharaan jalan dilakukan melalui tahap-tahap yang rasional dan terpadu yang dikenal dengan siklus pemeliharaan. Dari beberapa pendapat di atas maka dapat diketahui bahwa pemeliharaan jalan adalah kegiatan untuk memelihara atau menjaga fasilitas masyarakat berupa jalan tetap berfungsi dengan baik secara berkala maupun secara rutin.

E. Kerangka Pikir

Sasaran utama pembangunan yaitu pelaksanaan fungsi Pekerjaan Umum yaitu melakukan upaya perbaikan jalan dan meningkatkan kualitas pembangunan jalan agar dapat digunakan sebagaimana layaknya. Pembangunan jalan selain sebagai sistem transportasi, juga merupakan usaha dalam menunjang pembangunan suatu wilayah dan juga merupakan usaha dalam meningkatkan daya saing suatu wilayah. Dalam penelitian ini penulis berfokus hanya kepada pelaksanaan fungsi Dinas Pekerjaan Umum saja demi memperbaiki sistem transportasi dan mengoptimalkan kinerja para petugas pekerjaan umum.

Pada penelitian ini maka peneliti menyajikan kerangka pikir sebagai berikut:

Gambar 1 : Kerangka Pikir



F. Fokus penelitian

Fokus penelitian ini adalah fungsi Dinas Pekerjaan Umum (PU) dalam Evaluasi dan Pelaporan kegiatan pemeliharaan jalan di Kabupaten Takalar. Jadi berangkat dari rumusan masalah yang kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan teori dalam tinjauan pustaka maka peneliti fokus pada fungsi Dinas Pekerjaan Umum (PU).

G. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Penyusunan adalah suatu kegiatan atau memproses sesuatu dan atau kumpulan data untuk rencana teknis, program pembinaan dan bimbingan teknis di bidang Bina Marga.
2. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian, pengendalian, dan pelaksanaan pekerja Bina Marga.
3. Perizinan adalah pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum.
4. Penanggulangan adalah suatu cara untuk menyelesaikan masalah jalan dan jembatan akibat bencana alam.
5. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan dan direncanakan berlangsung selama 2 bulan, lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar karena melihat kondisi jalan sekitar tiga kilometer akses jalan kelurahan yang menghubungkan antara Gowa-Takalar, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, kondisinya kian memprihatinkan karena rusak parah dan tidak mendapatkan perhatian dari kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum.

B. Jenis dan Tipe penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif fokus kualitatif, dimana penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Takalar. Tipe penelitian yang digunakan adalah fenomenologi yaitu peneliti melakukan pengumpulan data dengan observasi partisipan untuk mengetahui fenomena esensial partisipan dalam pengalaman informan (Sugiyono: 2014).

C. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dan data sekunder sebagai berikut:

- a) Data Primer merupakan data yang didapatkan dari informan utama tanpa melalui perantara, yaitu data yang diperoleh dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung dengan kepala dinas beserta stafnya yang +
- b) berkaitan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian di dinas pekerjaan umum Takalar. Seperti opini subjek secara individual, artinya opini-opini yang disampaikan secara langsung oleh informan kepada peneliti. Biasanya metode yang sering digunakan dalam pengumpulan data primer yaitu metode wawancara, baik secara tatap muka maupun melalui telepon.
- c) Data sekunder merupakan data pelengkap yang didapatkan dari informan, seperti buku-buku, arsip, dan internet yang dianggap bisa memberikan informasi terkait dengan penelitian ini.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi pada pembangunan jalan di lassang barat kecamatan polongbangkeng utara kabupaten takalar.

Arikunto (1999), bahwa penetapan informan menjadi sampel dengan tujuan tertentu disebut dengan sampel bertujuan atau *purposive sampling*, dimana peneliti menentukan sampel berdasarkan tujuan tertentu, tetapi harus memenuhi syarat-syarat ilmiah sebagai berikut:

1. Pengambilan sampel harus di dasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi.
2. Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat dalam populasi.

3. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi pendahuluan.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Sampling Purposive. Yaitu sampel yang diambil secara sengaja. Maksudnya peneliti mengambil sampel tidak secara acak, tapi ditentukan sendiri oleh peneliti.

Tabel 1: Informan Penelitian

Jabatan Informan	Jumlah informan
Kepala PU	1 Orang
Kepala Bidang	1 Orang
Pegawai Dinas PU	2 Orang
Masyarakat	5 Orang
JUMLAH	9 Orang

Sumber : *Kepala Bidang Tata Usaha Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten*

Takalar.

E. Teknik pengumpulan Data

Menyusun instrumen adalah pekerjaan yang paling dalam langkah penelitian akan tetapi mengumpulkan data akan lebih jauh lebih penting lagi untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan kegunaannya. Metode atau cara pengumpulan data yang penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan cara dokumentasi, observasi, dan wawancara.

1. Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana penelitian mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subyek yang diteliti.

Fungsi observasi ini untuk menyaring dan melengkapi data yang tidak diperoleh melalui interview atau wawancara.

2. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara peneliti dengan informan penelitian dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).
3. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Jadi dokumentasi adalah sesuatu teknik dimana data diperoleh dari dokumen yang ada benda-benda tertulis , buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian. Tujuan digunakan metode ini untuk memperoleh data secara jelas dan konkret tentang pelaksanaan fungsi dinas pekerjaan umum dalam mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pemeliharaan jalan di Kabupaten Takalar.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah langkah selanjutnya untuk mengolah data dari hasil penelitian menjadi data. Dimana data diperoleh, dikerjakan, dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif (*interactive model of analysis*) dalam model ini terdapat 3 komponen pokok Menurut Miles dan Hubberman dalam Sugiono (2012), ketiga komponen tersebut yaitu:

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan komponen pertama analisis data yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan penelitian ini dapat dilakukan.

b. Sajian data

Sajian data merupakan suatu rakitan informasi yang memungkinkan kesimpulan secara singkat dapat berarti cerita sistematis dan logis supaya makna peristiwanya menjadi lebih mudah dipahami.

c. Penarikan kesimpulan

Dalam awal pengumpulan data penelitian sudah harus mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ia temui dengan mencatat peraturan-peraturan sebab akibat, dan berbagai proporsi sehingga penarikan kesimpulan dapat dipertanggung jawabkan.

G. Keabsahan Data

Menurut Sugiono (2013), Triangulasi dalam pengujian kreadibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi, sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini penelitian melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara

dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian penelitian membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda maka penelitian melakukan diskusi lebih lanjut kepada data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil ujian menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian dari tim peneliti lain diberi tugas melakukan pengumpulan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PROFIL DINAS PEKERJAAN UMUM

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar merupakan salah satu Dinas Teknis Pemerintahan Kabupaten Takalar yang dibentuk berdasarkan peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pemerintahan Kabupaten Takalar. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar Bertempat di Jl. Diponegoro No. 78 A (0418) 21148 Takalar. Di bawah Pimpinan Ir. H Alimuddin dari Tahun 2015 sampai sekarang.

1. Visi Dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar

Dengan mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Takalar Tahun 2012-2017 tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi

Terwujudnya pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan pemukiman serta perumahan yang handal, berbudaya, dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Takalar.

Misi

Mendorong terwujudnya perumahan yang layak huni dan penyelenggaraan penataan ruang wilayah dan kawasan yang dinamis dan responsive, akomodatif, serasi dan seimbang, transparan serta legitimate yang di jabarkan melalui yang ingin dicapai yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan.
 - b. Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan serta cukupan pelayanan dasar bidang perumahan.
 - c. Meningkatkan system jaringan infrakstruktur sumber daya air dalam mendukung ketahanan pangan dengan berdasarkan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
 - d. Mewujudkan bangunan gedung yang fungsional sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungan dan meningkatkan kualitas permukiman serta cukupan pelayanan dasar.
2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar

Kepala Dinas Pekerjaan Umum sebagai unsur pemerintah Kabupaten bertanggung jawab Kepada Bupati Takalar dalam pelaksanaan tugas pemerintah dan pelayanan dibidang Pekerjaan Umum. Dinas Pekerjaan Umum adalah unsur pelaksanaan pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seseorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah Kabupaten Takalar. Dinas Pekerjaan Umum adalah salah satu instansi pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan dibidang Pekerjaan Umum yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, dan Pelayanan Bina Marga, Cipta karya, Pengairan, dan Tata ruang.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum Mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum, Bina Marga, Cipta karya, Pengairan, dan Tata ruang;
2. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pengendalian, pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan jalan dan jembatan, drainase, irigasi, sungai, sumber daya air, bangunan dan gedung, permukiman dan perumahan, sanitasi perkotaan, serta tata ruang yang menjadi kewenangan daerah;
3. Pelaksanaan kegiatan pemungutan retribusi yang menjadi kewenangannya;
4. Pelaksanaan Standard Pelayanan Minimal (SPM) dan Standard Pelayanan Public (SPP) serta pelaksanaan fasilitas pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara periodik untuk memperbaiki kualitas layanan dan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Pekerjaan Umum;
5. Pembinaan kewenangan di bidang perencanaan teknis, jasa konstruksi, rekomendasi perizinan Bidang Bina Marga. Cipta karya, Pengairan dan Tata Ruang;
6. Pengelolaan Administrasi Umum yang meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas;
7. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/ unik kerja lain;
8. Pembuatan laporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum (LAKIP)
9. Pemberian pembinaan, petunjuk dan pelaksanaan pemadam kebakaran, dan pengelolaan Rusunawa dan jabatan fungsional, serta;

10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Tugas Pokok dan Fungsi jabatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas sebagaimana dimaksud mempunyai tugas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelayanan Bina Marga, Cipta karya, pengairan dan tata ruang. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- 1) Memimpin dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan 4;
- 2) Memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi dan;
- 3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis administrasi urusan umum dan kepegawaian, keuangan serta penyusunan program dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi bidang administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, protocol, hubungan masyarakat, pemeliharaan, penyusunan program dan perencanaan serta laporan Dinas

Pekerjaan Umum. Untuk menyelenggarakan tugas pokok diatas, sekretariat mempunyai uraian Fungsi:

1. Melaksanakan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan teknis, program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum.
2. Mengkoordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pekerjaan Umum.
3. Membina, mengawasi dan melaksanakan administrasi umum, produk hukum Dinas, pengendalian dan pelaporan.
4. Melaksanakan dan mengelola anggaran rutin rumah tangga;
5. Melakukan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, protocol dan surat menyurat dinas, kearsipan dan perpustakaan;
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas:

1. Melaksanakan surat menyurat;
2. Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan tata usaha, pemeliharaan perlengkapan dan peralatan dinas;
3. Menyusun rencana dan mengurus pemeliharaan kebersihan dan keamanan dinas, kehumasan, kearsipan, mengelola perpustakaan dan keprotokolanan;
4. Menyiapkan data dan mengolah administrasi kepegawaian;

5. Menginventarisasi asset barang milik daerah yang dikelola dinas baik tidak bergerak maupun bergerak;
6. Mengoptimalkan barang milik daerah yang dikelola oleh dinas;
7. Menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang di lingkungan Dinas, dan;
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat sesuai tugas dan fungsinya.

d. Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

1. Mengumpulkan dan mensistematisasikan data untuk bahan penyusunan anggaran rutin dan pembangunan;
2. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan rencana anggaran rutin dan pembangunan;
3. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan dan pembukuan realisasi anggaran serta membuat laporan pertanggungjawaban;
4. Menyelesaikan tuntutan ganti rugi serta biaya lain sebagai pengeluaran dinas;
5. Melaksanakan evaluasi pengeluaran anggaran rutin dan pembangunan serta pelaporan dan;
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretariat sesuai tugas dan fungsinya.

e. Kepala Sub Bagian Perencanaan

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

1. Mengumpulkan dan mensistematisasikan data untuk bahan penyusunan program dinas;
2. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja dinas;
3. Melaksanakan analisi, evaluasi dan pengendalian dalam melaksanakan tugas dinas dan anggaran dinas dengan Sub Bagian Keuangan;
4. Menyusun rencana kebutuhan peralatan operasional untuk melaksanakan tugas dinas dan anggaran dinas dengan Sub Bagian Keuangan;
5. Mengadakan koordinasi untuk penyusunan kebutuhan bidan dan UPTD dalam melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan;
6. Menyusun harga satuan pekerjaan konstruksi (HSPK) berkoordinasi dengan bidang-bidang;
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

f. Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

1. Mengumpulkan dan mensistematisasikan data untuk bahan penyusunan anggaran rutin dan pembangunan;
2. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan rencana anggaran rutin dan pembangunan;
3. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan dan pembukuan realisasi anggaran serta membuat laporan pertanggungjawaban;
4. Menyelesaikan tuntutan ganti rugi serta biaya lain sebagai pengeluaran dinas;

5. Melaksanakan evaluasi pengeluaran anggaran rutin dan pembangunan serta pelaporannya dan;
6. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

g. Kepala Sub Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok melaksanakan survey dan perencanaan teknis, pembangunan, pemeliharaan jalan, jembatan dan jalan lingkungan yang menjadi kewenangan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bidang Bina Marga, mempunyai uraian tugas:

1. Menyiapkan dan Mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan program dan estimasi biaya pelaksanaan kegiatan pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan;
2. Melaksanakan penelitian dan pengkajian dokumen teknis, pembinaan dan pengawasan kegiatan pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan;
3. Mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan;
4. Merumuskan kebijakan penyelenggaraan jalan berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian daerah dan antar kawasan;
5. Menyusun pedoman operasional penyelenggaraan jalan daerah;
6. Menyusun data dalam rangka penetapan status jalan daerah;
7. Menyusun perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan daerah.
8. Mengembangkan teknologi terapan dibidang jalan untuk jalan daerah;

9. Menyiapkan materi rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan;
10. Melaksanakan undang-undang, peraturan daerah, kebijakan dan strategi daerah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

h. Kepala Bidang Jasa Konstruksi

Bidang Jasa Konstruksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan Kebijakan operasional di bidang pembinaan jasa konstruksi. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud di atas Kepala Bidang Jasa Konstruksi mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pengembangan dan meningkatkan kompetensi tenaga ahli konstruksi;
2. Penyelenggaraan system informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten;
3. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, penyebarluasan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi;
4. Pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
5. Pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
6. Pelaksanaan pembinaan lembaga pengembangan jasa konstruksi tingkat kabupaten dan asosiasi jasa konstruksi;

7. Peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri;
8. Pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

i. Kepala Bidang Pengairan

Kepala Bidang Pengairan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembangunan, peningkatan jaringan irigasi, pemeliharaan jaringan irigasi, sungai dan anak sungai, serta pembinaan, pengawasan, rekomendasi, dan penyuluhan di Bidang Pengairan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bidang Pengairan, mempunyai uraian tugas:

1. Menyusun program kerja untuk peningkatan kerja dan pembangunan jaringan irigasi baru yang menjadi kewenangan daerah;
2. Melaksanakan pembinaan, penyuluhan, pengembangan teknologi dan menyiapkan rekomendasi penggunaan sumber daya air;
3. Mengembangkan teknologi terapan di bidang drainase, irigasi dan sumber daya air yang menjadi kewenangan daerah;
4. Melaksanakan dan mengawasi peraturan, kebijakan dan strategi daerah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
5. Membangun dan memelihara drainase, irigasi, anak sungai, dan sumber daya air daerah;
6. Menyelesaikan permasalahan operasionalisasi system drainase dan banjir akibat bencana dengan berkoordinasi daerah sekitarnya;

7. Menyusun rencana induk jaringan drainase dan irigasi skala daerah;
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

j. Kepala Bidang Cipta Karya

Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai tugas pokok melaksanakan survey dan perencanaan teknis, pembangunan, pemeliharaan bangunan dan gedung milik pemerintah daerah beserta sarana dan prasarannya serta melaksanakan urusan bidang pemukiman yang meliputi teknis perencanaan pembangunan, perbaikan dan peremajaan pemukiman, sanitasi permukiman dan sarana serta prasarana lingkungannya.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bidang Cipta Karya, mempunyai uraian tugas:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kota di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dan provinsi;
2. Menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kota;
3. Menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan kota dalam penyediaan rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman;

4. Melaksanakan pemanfaatan teknologi dan rancang bangunan yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan;
5. Mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembangunan, pemeliharaan bangunan dan gedung milik pemerintah daerah, sanitasi permukiman dan sarana prasarana lingkungannya;
6. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan kebijakan, strategi, serta program di bidang pemukiman dan kawasan permukiman serta pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum pada tingkat kota;
7. Menyusun fasilitas penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR;
8. Memberikan pendamping bagi orang perseorangan yang melakukan pembangunan rumah swadaya;

k. Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman

Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas:

1. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan perumahan dan permukiman;
2. Melaksanakan pengaturan, dan pengendalian teknis dalam pembangunan perumahan dan permukiman dan prasarana lingkungannya;
3. Menyusun bahan kajian dalam rangka penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan;

4. Menyiapkan bahan penerbitan advice planning (AP) dan pemberian pertimbangan teknis penerbitan slite plan;
5. Melaksanakan pengaturan, pemeliharaan dan pengendalian teknis dalam penataan ruang area perumahan, zonasi dan lokasi pembangunan rumah susun umum, rumah susun khusus dan rumah susun Negara dengan mempertimbangkan daya tamping lingkungan berkoordinasi dengan bidang Tata Ruang;
6. Melaksanakan penyediaan dan pengembangan kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba)
7. Menyusun fasilitasi pendanaan dan pembiayaan dalam rangka penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR;
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Kepala Bidang Tata Ruang

Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai tugas pokok pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang menjadi kebijakan pemerintah daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Tata Ruang mempunyai uraian tugas:

1. Melaksanakan penyusunan rencana program bidang tata ruang dalam rangka kegiatan dinas;
2. Melaksanakan survey dan pemetaan tata ruang daerah dalam rangka pemanfaatan dan pengendalian tata ruang daerah;
3. Melaksanakan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;

4. Mengadakan penelitian dan pengembangan dalam rangka pemanfaatan dan pengendalian tata ruang daerah;
5. Menetapkan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
6. Menetapkan retribusi dan melaksanakan proses teknis penertiban izin mendirikan bangunan (IMB) sesuai dengan Peraturan Daerah dan Ketentuan yang berlaku;
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. EVALUASI DAN PELAPORAN DALAM PEMELIHARAAN JALAN

Evaluasi adalah proses mendeskripsikan, mengumpulkan dan menyajikan suatu informasi yang bermanfaat untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Tujuan evaluasi disini adalah untuk menghimpun informasi yang dijadikan dasar untuk mengetahui taraf kemajuan, perkembangan, dan pencapaian. Evaluasi merupakan proses mempertimbangkan makna, keefektifan, ketetapan berdasar pada kriteria atau tujuan, atau proses pemberian nilai atas sesuatu untuk mengambil keputusan. Gronlund (1985), berpendapat evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan, sampai sejauh mana tujuan program telah tercapai.

Evaluasi dan pelaporan sebagai salah satu fokus dalam penelitian ini akan spesifik membahas tentang kebijakan yang telah dan akan diambil oleh pemerintah dalam usaha pemeliharaan jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Dalam

pemeliharaan jalan, konsep mengenai jalan merupakan konsep utama dalam penelitian ini. Menurut Wignall (1999), salah satu bagian dari sistem transportasi yang merupakan prasarana umum/infrastruktur adalah jalan, yang didefinisikan sebagai jalur dimana masyarakat mempunyai hak untuk melewatinya tanpa memerlukan izin khusus untuk itu. Maka dari itu, perlu adanya pemeliharaan untuk tetap menjaga kenyamanan masyarakat. Dari penjelasan tersebut muncullah konsep pemeliharaan jalan yang dimaksud dalam penelitian ini. Menurut Mahmud dkk (2002:15), rencana pemeliharaan jalan meliputi system informasi, system manajemen asset, dan rencana penanganan pemeliharaan jalan yang meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan rehabilitasi.

Dalam bab ini peneliti akan menyajikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar dengan informan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Bidang Bina Marga, dan Staf Pekerjaan Umum. Disamping itu, masyarakat juga turut serta memberikan penjelasan mengenai Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Takalar.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Takalar khususnya Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan pemeliharaan jalan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal bidang pekerjaan umum tentang tata cara proses pelaksanaan pemeliharaan jalan yakni dengan memanfaatkan secara optimal saran dan prasarana yang ada.

1. Penyusunan

Penyusunan adalah suatu kegiatan atau memproses sesuatu dan atau kumpulan data untuk rencana teknis, program pembinaan dan bimbingan teknis di bidang Bina Marga. Dalam sebuah penyusunan kegiatan pemeliharaan jalan ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Menurut informasi yang didapatkan oleh penulis melalui wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar, yang menyatakan bahwa:

“Sebelum memulai pemeliharaan jalan, kami terlebih dahulu turun kejalan-jalan melakukan survei untuk memperoleh data administrasi dan tentang kondisi jalan-jalan yang membutuhkan pemeliharaan jalan”
(HA, 16 Agustus 2017)

Survei merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan sebelum mengambil keputusan, dikarenakan dengan melakukan survei kita dapat mengetahui tingkat kerusakan jalan dan penanganan seperti apa yang harus dilakukan dalam pemeliharaan jalan tersebut. Berdasarkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 13 /PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Pemilikan Jalan Pasal 9 ayat 1 “Survei pemeliharaan jalan dimaksudkan untuk memperoleh data administrasi dan data kondisi jalan”.

Kondisi jalan di Kabupaten Takalar yang telah diketahui, maka selanjutnya yang diperlukan ialah pengadaan anggaran sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum pada saat wawancara dengan penulis, bahwa:

“Proses pengalokasi anggaran jalan itu ada beberapa kriteria: 1.usulan masyarakat, masyarakat bersurat ke Kabupaten tembusan ke dinas PU bahwa ruas jalan ini rusak sekian panjangnya dan kerusakannya sekian, 2.usulan dari pemerintah setempat (dinas PU) dinas PU melihat bahwa di ruas jalan sana perlu penanganan, 3. Ada intervensi dari pusat penanganan dari pusat kriteria yaitu wilayah strategis. Misalnya yang

terhubung dengan pariwisata, pertanian, pelabuhan, itu intervensi dari pusat” (HA, 16 Agustus 2017)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar yang mengatakan bahwa terdapat tiga kriteria dalam proses pengalokasian anggaran yakni : usulan dari masyarakat mengenai ruas jalanan yang rusak. Kemudian dapat pula dari usulan pemerintah setempat ataupun adanya intervensi dari pusat penanganan. Anggaran merupakan point terpenting dalam melaksanakan suatu program. Hal ini juga merupakan awal mula jalanan yang rusak masuk ke dalam program Dinas Pekerjaan Umum.

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 13 /PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan Pasal 14 Ayat 3 berbunyi : Pembiayaan kegiatan pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 7, pasal 9, dan pasal 10 untuk status jalan kabupaten/kota dan jalan desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota (APBD Kab/Kota). Hal tersebut juga ditegaskan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar melalui wawancara dengan penulis, yang mengatakan bahwa:

“Setelah kita melalui alokasi anggaran maka kita masukkan dalam rencana anggaran kita. Kembali lagi ke pemeliharaan rutin jalan dilaksanakan oleh Dinas nya sendiri dan diawasi oleh Dinasnya sendiri.” (HA, 16 Agustus 2017).

Kepala Dinas Pekerjaan Umum mengatakan bahwa dalam proses penyusunan program pemeliharaan jalan, mereka terlebih dahulu merumuskan alokasi anggaran ke dalam rencana anggaran yang dibutuhkan. Setelah dana alokasi ditentukan dan keluar, barulah mereka melaksanakan kegiatan

pemeliharaan jalan tersebut. Pemeliharaan jalan dilakukan berdasarkan jumlah dana yang ada.

2. Pengawasan

Pengawasan adalah kegiatan manajemen yang berkaitan dengan pemeriksaan untuk menentukan apakah pelaksanaannya sudah dikerjakan sesuai dengan perencanaan, sudah sejauh mana kemajuan yang dicapai dan perencanaan yang belum mencapai kemajuan serta melakukan koreksi bagi pelaksanaan yang belum terselesaikan sesuai rencana. Menurut Drs. Chabi Soleh, MM dalam buku *Asas-Asas Manajemen* (1999:109), Pengawasan adalah suatu pengamatan yang pada umumnya dilakukan secara menyeluruh yang dilakukan secara sadar dengan membandingkan antara yang seharusnya dan yang dilaksanakan.

Dalam rangka meningkatkan disiplin kerja pegawai dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi sangat perlu diadakan pengawasan, karena pengawasan mempunyai beberapa tujuan yang sangat berguna bagi pihak-pihak yang melaksanakan. Terkait pemaparan tersebut, penulis juga mendapatkan informasi melalui wawancara dengan Kepala Bidang Bina Marga Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar, yang menyatakan bahwa:

“Pemeliharaan jalan telah berlangsung dengan baik, dan telah mencapai sekitar 95%. Saya sebagai Kepala Bidang Bina Marga Pekerjaan Umum meminta maaf kepada masyarakat karena aktifitas pemeliharaan jalan ini mungkin telah mengganggu aktivitas masyarakat sekitar” (MA, 21 Agustus 2017).

Pemeliharaan jalan di Kabupaten Takalar menurut Kepala Bidang Bina Marga Kabupaten Takalar telah rampung sekitar 95% dan telah berjalan dengan baik. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat kepada

penulis pada saat wawancara dengan salah satu warga di Desa Caddika, yang menyatakan bahwa:

“Memang benar telah diadakan perbaikan jalan, tapi Sebenarnya masalah jalanan rusak disini tidak terlalu dipermasalahkan, karena kita sudah terbiasa dengan jalanan yang seperti ini (rusak) dari puluhan tahun. Yang menjadi keluhan banyak warga disini itu masalah perairan. Perairan didaerah ini sangat susah aksesnya. Air di sini hanya mengalir sekali dalam sebulan” (At, 21 Agustus 2017).

Menurut pengamatan penulis, mereka yang berada di daerah Caddika tidak begitu khawatir dengan jalanan yang rusak, karena memang sudah bertahun-tahun jalanan tersebut tidak pernah tersentuh tangan pemerintah. Meskipun jalanan yang diperbaiki hanya separuh dari jalanan yang rusak, mereka tidak merisaukan hal tersebut. Yang mereka khawatirkan adalah perairan yang hanya mengalir sekali sebulan. Warga Caddika kekurangan pasokan air bersih sehingga sawah-sawah tidak panen 2 kali setahun akibat kekurangan air. Akibatnya perekonomian mereka pun jadi terganggu.

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh masyarakat lainnya yang berada di Desa Cadika melalui wawancara dengan penulis, yang menyatakan bahwa:

“Iya sudah lebih baik karena sudah diperbaiki dan di beton sepanjang 60 meter. Walaupun tidak seluruhnya jalanan yang mereka perbaiki, masih ada sekitar 1 kilo meter yg belum diperbaiki” (MN, 21 Agustus 2017).

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar telah menyelesaikan sekitar 60 meter jalanan rusak di Kabupaten Takalar. Dengan demikian Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar dapat dikatakan telah melaksanakan tugasnya dengan

baik dan mampu memuaskan hati masyarakat. Namun, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar tetap harus melakukan survei di setiap wilayah Kabupaten Takalar serta dalam pelaksanaannya perlu ditingkatkan koordinasi dengan masyarakat serta lembaga yang terkait supaya tidak merugikan masyarakat baik pengguna jalan yang melintasi jalan tersebut ataupun warga di sekitar jalan.

Sehubungan dengan pernyataan masyarakat di atas, komentar dari masyarakat lainnya juga diperoleh oleh penulis melalui wawancara dengan salah satu masyarakat lainnya, yang mengatakan bahwa:

“Iya mengganggu, apalagi sekarang lagi ada pekerjaan tambang pasir dan tambang batu” (HR, 21 Agustus 2017).

Aktivitas pemeliharaan jalan pasti akan memberikan kesan tidak nyaman bagi masyarakat sekitar. Penggunaan alat-alat berat yang terparkir di ruas jalan, arus lalu lintas menjadi macet, ditambah pekerjaan tambang pasir dan tambang batu yang mengganggu aktivitas masyarakat sekitar. Akibatnya rumah-rumah yang berada disekitar jalanan menjadi berdebu, aktivitas masyarakat juga sangat terhalang.

Tujuan utama dari pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat benar-benar merealisasikan tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya baik pada waktu itu maupun waktu-waktu yang akan datang.

3. Perizinan

Menurut Sjahrhan Basah, Izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi dapat dikatakan bahwa izin merupakan perangkat hukum administrasi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan warganya. Salah satu perangkat administrasi adalah organisasi, organisasi ini bisa berjalan dengan baik apabila dilakukannya pembagian tugas sebagai koordinasi dan pengawasan. Sehubungan dengan itu, maka penulis mendapatkan informasi melalui wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, yang menegaskan bahwa:

“Kegiatan pemeliharaan jalan yang akan dilaksanakan pada setiap tahun itu dituangkan ke dalam dokumen rencana penanganan jalan sesuai dengan persyaratan teknis. Rencana penanganan pemeliharaan jalan ini sudah diatur dalam Undang-undang” (HA, 16 Agustus 2017).

Dalam hal perizinan, kegiatan pemeliharaan jalan ini di masukkan dalam program kerja Dinas Pekerjaan Umum yang tentunya telah memiliki izin sebelumnya. Kegiatan pembangunan jalan sejak dari dulu telah memiliki izin, sedangkan kegiatan pemeliharaan jalan harus seiring dengan kegiatan membangun jalan. Menurut pasal 4 bagian B nomor 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah , menyebutkan bahwa pemerintah dengan sangat jelas memberikan izin terhadap pemeliharaan atas jalan.

Hal ini senada dengan pernyataan oleh Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar. Berdasarkan informasi yang didapat melalui wawancara dengan penulis, yang menyatakan bahwa

Pemerintah memberikan izin penuh dalam proses pemeliharaan jalan. Hal ini ditegaskan dalam Undang—Undang No. 14 Tahun 1987 yang setiap tahunnya dilaksanakan dalam dokumen rencana penanganan.
(MA, 21 Agustus 2017)

Dalam hal ini, Kepala Bidang Bina Marga setuju dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar. Beliau juga menyampaikan bahwa kegiatan perizinan sudah diatur dalam Undang-undang.

Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku warga. Sedangkan izin dalam arti sempit adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya

Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Spelt dan Ten Berge, dalam izin dapat dipahami bahwa suatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan oleh pemerintah. Dengan demikian, pemerintah mengikatkan perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang atau pihak yang bersangkutan.

4. Penanggulangan

Setiap aktivitas atau program yang dijalankan tidaklah selalu berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita, akan ada ditengah-tengah suatu

aktivitas berjalan akan timbul suatu masalah. Masalah tersebut dapat diatasi dengan melakukan penanggulangan. Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi. Seperti halnya dengan aktivitas pemeliharaan jalan di Kabupaten Takalar, dimana menurut pemaparan Kepala Dinas Pekerjaan Umum melalui wawancara dengan penulis yang mengatakan bahwa:

“Sudah dilaksanakan namun yang sudah dilakukan tidak begitu sempurna karena kita laksanakan sesuai alokasi anggaran yang ada. Contohnya begini, pemeliharaan periodik jalan yang ditakalar ini membutuhkan dana 10 miliar atau 5 miliar, tetapi anggaran yang tersedia cuma 2 miliar, nah itu yg kita maksimalkan. Jadi kita laksanakan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Cuma karena keterbatasan dana dari pemerintah pusat dalam mengalokasikan dana kebutuhan-kebutuhan yang sesuai kondisi jalan itu yang kita maksimalkan”

(HA, 16 Agustus 2017).

Faktor utama yang membuat petugas Pekerjaan Umum mogok dalam tugas penanggulangan adalah faktor anggaran. Dana alokasi yang diterima dari pemerintah pusat tidak sesuai dengan budget yang dibutuhkan dalam pemeliharaan jalan. Hal itulah yang menjadi penyebab utama terabaikannya jalan poros Caddika. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, tingkat perbaikan kerusakan jalan poros Caddika mengalami peningkatan 10%. Yaitu dari 70% sekarang menjadi 80%. Sisanya masih mengalami kerusakan berat atas dasar terbatasnya anggaran.

Berdasarkan hasil pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti, upaya penanggulangan kerusakan jalan di Desa Caddika tidak sesuai dengan kenyataan pada umumnya. Pasalnya, jalan poros Cadika Lassang Barat tersebut sudah lama mengalami kerusakan yang parah namun tidak ada penanggulangan

yang dilakukan secara khusus untuk memperbaiki keadaan tersebut. Hal ini senada dengan pernyataan dari salah satu warga yang berada di desa Cadika melalui wawancara dengan penulis yang mengatakan bahwa:

“Sudah lama sekali jalanan disini diperbaiki tapi belum selesai-selesai juga. Saya tidak tau sampai kapan jalanan ini diperbaiki” (HN, 21 Agustus 2017).

Keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan memang sering kali dilakukan oleh beberapa kalangan pekerja, mengundur-undur waktu sehingga pekerjaan tidak terselesaikan tepat waktu. Pengerjaan jalan yang sedikit-sedikit juga mengganggu aktivitas masyarakat setempat. Masyarakat sekitar menganggap bahwa pemerintah setempat kurang efektif dalam menyelesaikan aktivitas pemeliharaan jalan tersebut. Ketepatan waktu dapat menjadi faktor pendukung namun dapat pula menjadi faktor penghambat. Apabila waktu tidak dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin maka akan menimbulkan penumpukan pekerjaan, hal inilah yang terjadi pada aktivitas pemeliharaan jalan yang tak kunjung-kunjung terselesaikan.

5. Pengumpulan Data

Menurut Gulo (2002:110), pengumpulan data merupakan aktivitas yang dilakukan guna mendapatkan informasi yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan dari suatu penelitian. Adapun tujuan penelitian adalah jawaban dari rumusan masalah ataupun hipotesis penelitian, untuk dapat menjawabnya diperlukan data atau informasi yang diperoleh melalui tahapan pengumpulan data. Informasi atau data mempunyai karakteristik yang berbeda beda sehingga

membutuhkan metode yang berbeda-beda pula. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Bina Marga melalui wawancara dengan penulis yang mengatakan bahwa:

“Jenis kerusakan yang terjadi pada ruas Jalan Cadika adalah retak melintang, retak memanjang, retak kulit buaya, retak pinggir, retak berkelok-kelok, bergelombang, pengelupasan, lubang dan tambalan. Jenis kerusakan yang paling dominan pada ruas Jalan Cadika adalah retak memanjang yang terdapat pada 18 segmen. Pada setiap segmen terdapat beberapa kerusakan. Contohnya pada segmen 1 terdapat kerusakan retak melintang, retak memanjang, retak pinggir, retak kulit buaya, lubang dan tambalan yang disebabkan oleh beberapa faktor” (MA, 21 Agustus 2017).

Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yang didapatkan dari Kepala Bidang Tata Usaha Bina Marga Kabupaten Takalar, diperoleh hasil survei sebagai berikut :

1. Ruas Jalan Cadika merupakan jalan kolektor dengan kelas jalan III dan melayani lalu lintas 2 arah.
2. Survei kondisi jalan dilakukan menyeluruh pada ruas Jalan Cadika yang dibagi atas dua puluh dua segmen.
3. Hasil pengamatan secara visual jenis kerusakan pada ruas Jalan Cadika adalah dengan panjang jalan yang disurvei 12 km yang dibagi dalam 22 segmen adalah retak melintang, retak memanjang, retak kulit buaya, retak pinggir, retak berkelok-kelok, bergelombang, pengelupasan, lubang dan tambalan.

Berdasarkan survey pengumpulan data tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum menegaskan beberapa hal yang terkait dengan kegiatan pemeliharaan jalan, yang disampaikan melalui wawancara dengan penulis, yang mengatakan bahwa:

“Kegiatan pemeliharaan jalan ada 2, yaitu pemeliharaan periodik (berkala) dan pemeliharaan rutin. Pemeliharaan periodik jalan dilakukan tergantung kerusakannya. Jika sebuah jalan sepanjang 2 km dan tingkat

kerusakannya lebih dari 10% maka wajib dilakukan pemeliharaan periodik. Sedangkan pemeliharaan rutin dilakukan jika kerusakan yang terjadi sekitar 0 – 10%” (HA, 16 Agustus 2017).

Pernyataan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar, yang menegaskan bahwa untuk pemeliharaan jalan terdapat dua periodik yang dapat dilakukan yakni periodik berkala dan periodik rutin. Pemilihan periodik pemeliharaan jalan tergantung pada tingkat kerusakan jalanan yang akan diperbaiki. Selain itu, Kepala Bidang Tata Usaha Bina Marga Kabupaten Takalar juga memberikan data-data berupa tebal perkerasan untuk aktivitas pemeliharaan jalan di Kabupaten Takalar sebagai berikut :

Tabel 2:
Tabel Perkerasan Aktivitas Pemeliharaan Jalan Di Kabupaten Takalar

Jenis Program Pemeliharaan	Jenis Konstruksi Jalan Lama	Perkiraan Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR)			
		<200	200-560	500-3000	3000
Pemeliharaan Rutin	Tanah/Kerikil	10 cm Kerikil	-	-	-
	Penambalan Makadam	Pen. dgn <i>cold mix</i>	Pen. dgn <i>cold mix</i>	Pen. dgn <i>cold mix</i>	Pen. dgn <i>cold mix</i>
	Aspal Beton	-	Pen. dgn <i>cold mix</i>	Pen. dgn <i>cold mix</i>	Pen. dgn <i>cold mix</i>
Pemeliharaan Berkala	Tanah/Kerikil	15 cm Kerikil	-	-	-
	Penambalan Makadam	Lapen, Burtu, Burda, atau lataston	Lapen, Burtu, Burda, atau lataston	Burda atau Lataston	Burda atau Lataston
	Aspal Beton	Burtu, Burda, atau lataston	Burtu, Burda, atau	Burda atau Lataston	Burda atau Lataston

Sumber: Kepala Bidang Tata Usaha Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar.

Dalam pelaksanaan kebijakan pemeliharaan jalan kota di Kabupaten Takalar ini terdapat pelaksana tetap yaitu Satuan Petugas Pemeliharaan Jalan. Hal ini ditambahkan pula oleh Kepala Bidang Tata Usaha Bina Marga Kabupaten Takalar bahwa pelaksana kebijakan pemeliharaan jalan ini adalah Satuan Petugas tersebut yang memiliki anggota yang masing-masing masuk dalam bentuk tim. Hal ini juga senada dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang menegaskan bahwa:

“Untuk kegiatan pemeliharaan jalan ini sudah ada satuan petugas yang diberikan tugas untuk membantu kami dalam kegiatan pemeliharaan jalan. Mereka semua sudah dibagi-bagi dalam bentuk tim”
(HA, 16 Agustus 2017).

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala Bidang Tata Usaha Bina Marga, maka penulis memperoleh data-data penanggungjawab pemeliharaan jalan di Kabupaten yang dituangkan dalam bentuk table sebagai berikut:

Tabel 3:
Penanggung Jawab Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Takalar

Wilayah	Penanggung Jawab	Jumlah Tim	Jumlah Anggota
Timur	Pak Sawir	1 Tim	5 Orang
Selatan	Pak Darwis	1 Tim	5 Orang
Barat	Pak Saleh	1 Tim	4 Orang
Utara	Pak Ali	1 Tim	4 Orang

Sumber: Kepala Bidang Tata Usaha Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan di lapangan dapat diketahui bahwa kebijakan pemeliharaan jalan di Kabupaten Takalar yang sebelumnya telah direncanakan pasti akan tercapai karena segera dilaksanakan oleh Satuan Petugas Pemeliharaan Jalan karena sudah direncanakan kapan waktu

pelaksanaannya agar masyarakat bisa nyaman melewati jalan yang sudah diperbaiki tersebut.

Selain itu, tercapai dan tidaknya hasil kebijakan pemeliharaan jalan tergantung pada waktu pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan. Waktu yang tepat untuk melaksanakan kebijakan tersebut adalah saat musim kemarau karena apabila dilakukan di musim hujan, pemeliharaan jalan kota yang dalam hal ini overlay atau tambal sulam dengan aspal, hasilnya tidak akan maksimal. Hal ini disebabkan material aspal yang telah dipadatkan akan cepat mengelupas kembali akibat adanya hujan ataupun genangan air di bawah jalan tersebut sehingga lubang dapat muncul kembali dan dapat meluas. Oleh karena itu, waktu pelaksanaan seringkali tidak selaras dengan cuaca yang sedang terjadi di lapangan yang bisa menyebabkan hasil yang tidak maksimal.

6. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

Terkait dengan pernyataan diatas, penulis memperoleh informasi melalui wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang menyatakan bahwa:

“Untuk pemeliharaan jalan kali ini dilakukan dengan periodik berkala, karena tingkat kerusakannya cukup parah” (HA, 16 Agustus 2017).

Jalanan disepanjang Kabupaten Takalar telah mengalami kerusakan yang cukup parah dimana apabila dibandingkan dengan 3 tahun yang lalu kerusakan jalan dari 70% meningkat menjadi 80%, artinya peningkatan kerusakan bertambah hingga 10%. Dengan demikian pemeliharaan jalan dilakukan secara berkala karena kerusakan telah lebih dari 10%. Pemeliharaan berkala adalah pemeliharaan yang dilakukan terhadap jalan pada waktu tertentu (tidak menerus sepanjang tahun) dan sifatnya meningkatkan kemampuan struktural. Dalam hal ini, Kepala Bidang Bina Marga juga menegaskan bahwa:

“Pemeliharaan jalan sudah dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan apa yang sebelumnya direncanakan. Walaupun kami masih mengalami kendala, tapi masih dapat diselesaikan”
(MA, 21 Agustus 2017).

Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Bina Marga Kabupaten Takalar mengatakan bahwa walaupun dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan di Kabupaten Takalar memiliki kendala. Namun, aktivitas pemeliharaan jalan ini masih dapat berlangsung dengan baik.

Namun, berdasarkan kondisi di lapangan pelaksanaan pemeliharaan jalan di Kabupaten Takalar khususnya di jalan poros Cadika belum semaksimal yang kita bayangkan. Jalan poros Cadika ini berada jauh dari program pelaksanaan bidang Bina Marga. Jalanan yang berada jauh di pinggir kota ini sudah lama tidak tersentuh tangan pemerintah. Bahkan pemeliharaan jalan poros Cadika sebelumnya tidak termasuk di dalam program pelaksanaan oleh bidang Bina Marga.

Pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang. Faktor-faktor yang

dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut: Komunikasi, *resources*, disposisi, dan struktur birokrasi.

C. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN PEMELIHARAAN JALAN DI KABUPATEN TAKALAR

1. Responsivitas

Responsivitas Pelaksana pemeliharaan yang dimaksud seperti ketika ada kritikan, keluhan, dan saran dari masyarakat mengenai masalah pembangunan jalan di Cadika Lassang Barat yang ditujukan kepada pegawai Dinas Bina Marga selaku pelaksana pemeliharaan jalan. Responsivitas pegawai yang baik harus selalu memiliki sifat keterbukaan terhadap masukan dari berbagai masalah yang dilayangkan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas yang dimaksudkan.

Berikut pendapat bapak Muhammad Iskandar Adam selaku Kepala Bidang Bina Marga mengungkapkan bahwa:

“sejauh ini selama saya bertugas dalam menangani dan mengawasi pekerjaan termasuk perbaikan dan pemeliharaan jalan di daerah Cadika Lassang Barat semuanya dilaksanakan sesuai dengan intruksi hingga pekerjaan berjalan seperti saat ini akan tetapi dibalik semua ini kami tidak menutup kemungkinan bahwa sebuah pekerjaan akan selalu berhasil, maka dari itu tanggapan dari pihak lainnya termasuk masyarakat setempat tentang pembangunan kami terima dan salurkan melalui berbagai cara salah satunya mempertimbangkan saran ataupun kritiknya” (MA pada tanggal 16 Agustus 2017)

Informasi dari bapak Muhammad Idris Adam selaku kepala bidang Bina Marga mengungkapkan bahwa pihaknya menerima berbagai masukan dan mempertimbangkan segala masukan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan. Selain itu selama mereka menerima masukan dari

pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan, mereka akan mencoba menjelaskan maksud serta tujuan pembangunan tersebut agar tidak ada kesalahpahaman. Masyarakat yang kritis di butuhkan kesabaran dalam merespon dan menyampaikan maksud dari pembangunan.

Pendapat yang sama disampaikan oleh Pegawai Bidang Bina Mengatakan bahwa:

“dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan kerap kali dari pihak kami menerima keluhan dari masyarakat setempat dan kami berusaha semaksimal mungkin menanggapi keluhan hal tersebut kemudian mempertimbangkannya dalam program kerja apakah sesuai dengan SOP (standar operasional prosedur).

(MA,16 Agustus 2017).

Berdasarkan pemaparan bapak MA mengenai pembangunan dan pemeliharaan jalan di daerah Cadika Lassang Barat dapat di jelaskan bahwa dari pihak Dinas Pekerjaan Umum merespon dengan baik atau kata lain terbuka terhadap pelaksanaan pembangunan jalan. Akan tetapi jika dilihat secara langsung pembangunan jalan di daerah Cadika Lassang Barat masih sangat kurang mendapatkan perhatian dari pihak Dinas Pekerjaan Umum.

Berikut pendapat dari pihak masyarakat mengatakan bahwa:

“Sejauh ini pembangunan di daerah Cadika Lassang Barat terakhir tersentuh oleh pihak Pekerjaan Umum delapan tahun terakhir, keluhan masyarakat setempat mengenai jalan ini sudah tidak terhitung akan tetapi tidak ada respon dari Dinas Pekerjaan Umum padahal jalanan didaerah ini banyak dilalui kendar roda dua maupun roda empat”.

(SA, 16 Agustus 2017).

Informasi yang di dapatkan dari Bapak SA mengenai umpan balik dari keluhan masyarakat kepada pihak Dinas Pekerjaan Umum kurang mendapatkan respon balik dari Dinas Pekerjaan Umum. Kurangnya perhatian Dinas Pekerjaan Umum pada pembangunan jalan yang seharusnya lebih peka terhadap keluhan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, aktivitas pemeliharaan jalan di Kabupaten Takalar masih kurang dalam segi waktu pekerjaan yang seringkali dilakukan di siang hari

ketika lalu lintas sedang berada di puncak kepadatannya sehingga menyebabkan kemacetan sementara, yang membuat masyarakat terganggu meskipun telah berusaha untuk memaksimalkan pelaksanaan dengan berkoordinasi dengan lembaga terkait yang berada di lapangan seperti Polisi Lalu Lintas atau Dinas Perhubungan agar tidak menghambat kepadatan kendaraan yang melintasi lokasi kebijakan tersebut. Seperti wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan salah satu warga sekitar jalan poros Cadika, yang mengatakan bahwa:

“sebenarnya itu sangat mengganggu karena perbaikan jalan dilakukan disiang hari saat jalan dipadati oleh berbagai kendaraan. Kalau siangkan banya aktivitas warga. Jadi menurut saya waktu yang paling baik itu saat malam.” (YL, 21 Agustus 2017).

Salah satu warga yang dimintai pendapatnya mengatakan bahwa aktivitas pemeliharaan jalan yang dilakukan disiang hari sangat mengganggu. Pasalnya jalanan tersebut dilalui oleh ratusan kendaraan setiap hari. Saat pengerjaan jalan terjadi kemacetan panjang yang menghambat aktivitas warga. Selain itu, pihak yang diharapkan akan bekerjasama dalam kegiatan pemeliharaan tersebut kadang tidak memenuhi tugasnya. Seperti halnya polisi lalu lintas.

Selain itu, sumber daya manusia yang dimiliki oleh satuan tugas pemeliharaan jalan kurang memadai jika dibandingkan dengan luas Kabupaten Takalar yang besar sehingga seringkali pekerjaan dilakukan secara terburu-buru yang dapat membuat kualitas dari pekerjaan tersebut bisa tidak maksimal dan terdapat jalan rusak yang terabaikan dalam waktu yang sangat lama meskipun petugas-petugas tersebut diperkerjakan setiap hari sesuai dengan wilayah yang telah dibagi oleh koordinatornya.

Terkait dengan pernyataan diatas, hal yang sama juga dikemukakan oleh Kepala Bidang Bina Marga yang diperoleh melalui wawancara dengan penulis, yang mengatakan bahwa:

“ya, kita memang kekurangan tenaga pekerja dalam hal ini. Karena jalan yang akan diperbaiki lebih panjang daripada banyaknya pekerja. Jumlah pekerja kami hanya berjumlah 18 orang. Itulah mengapa kegiatan pemeliharaan ini sangat terlambat.” (MA, 21 Agustus 2017).

Terbatasnya petugas mengakibatkan kegiatan pengerjaan jalan terabaikan dan terbilang lama. Hal ini menjadi salah satu factor penghambat dari kegiatan pemeliharaan jalan di Kabupaten Takalar.

Pemeliharaan jalan Kabupaten Takalar telah membantu memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat karena memperbaiki kembali rusaknya jalan yang mereka lalui, mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas akibat jalan yang rusak meskipun membutuhkan proses aktivitas yang cukup lama.

Aktivitas pemeliharaan jalan kota di Kabupaten Takalar jelas seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, yaitu untuk memperbaiki jalan yang sudah rusak hingga bisa digunakan seperti sebelumnya dengan baik yang dikontrol sehingga bisa diketahui secara rutin. Beberapa masyarakat sebagai pengguna jalan mengutarakan pendapat bahwa hasil yang diinginkan tersebut dirasakan tepat dengan apa yang dibutuhkan masyarakat sehingga performa demikian yang perlu dipertahankan oleh pihak pelaksana aktivitas sehingga sebagai motivasi tersendiri dalam melaksanakan aktivitas pemeliharaan jalan kota di Kabupaten Takalar secara maksimal meskipun ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat terlihat bahwa dalam pelaksanaan aktivitas pemeliharaan jalan di Kabupaten Takalar terdapat unsur-unsur yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan aktivitas pemeliharaan jalan ini yakni permasalahan anggaran, waktu, sumber daya. Anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan aktivitas pemeliharaan jalan di Kabupaten Takalar dianggap tidak mampu memadai segala kebutuhan dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan tersebut, sehingga pada saat proses pelaksanaan pemeliharaan jalan sempat terjadi mogok kerja oleh satuan tugas pemeliharaan jalan di Kabupaten Takalar. Waktu yang tidak tepat, dimana pemeliharaan jalan dilakukan di siang hari saat-saat dimana lalu lintas sedang rame. Sumber daya yakni satuan tugas pemeliharaan jalan yang tidak memadai dengan luas jalanan yang memerlukan pemeliharaan sehingga pelaksanaan terkesan terburu-buru dan hasil yang tidak memuaskan.

Selain terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan di Kabupaten Takalar, terdapat pula faktor pendukung yang dimana mampu mengatasi segala masalah yang terjadi yaitu : responsivitas pemerintah setempat, dukungan masyarakat. Responsivitas pemerintah, walaupun masih terdapat masyarakat yang menganggap respon pemerintah masih kurang, namun masih terdapat pula yang menganggap bahwa respon pemerintah setempat terhadap pemeliharaan jalanan di Kabupaten Takalar telah menunjukkan performa yang cukup maksimal hal ini dibuktikan dengan pemeliharaan jalanan telah mencapai sekitar 60 meter. Dukungan masyarakat telah menjadi motivasi bagi pemerintah setempat untuk terus melanjutkan proses pelaksanaan pemeliharaan jalan di Kabupaten Takalar walaupun ditimpa beberapa masalah.

2. Responsibilitas

Responsibilitas digunakan untuk menilai kinerja organisasi publik. Responsibilitas merupakan ukuran kinerja yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggara pemerintah dengan hukum atau peraturan dan prosedur yang ditetapkan. Untuk bisa melaksanakan penilaian terhadap apa yang menjadi sikap, perilaku dan sepak terjang birokrasi publik, maka harus memiliki standar penilaian tersendiri yang sifatnya administratif atau teknis, bukan politis.

Berikut pendapat Pegawai Bidang Bina Marga mengatakan bawa:

“salah satu tanggung jawab kami mengenai pembangunan dan pemeliharaan jalan di berbagai daerah, dalam pertanggungjawaban pelaksanaan jalan kami berusaha melaksanakannya sesuai dengan anggaran yang ada .(MN, 16 Agustus 2017)

Berdasarkan hasil wawancara informan maka dapat diketahui bahwa pelaksana pemeliharaan jalan di Kabupaten Takalar memiliki responsibilitas yang cukup dengan melaksanakan pemeliharaan sesuai dengan anggaran yang ada. Pada saat observasi pun peneliti melihat jalanan di Takalar ada yang cukup baik dan adapula yang masih memerlukan pembenahan. Khususnya untuk daerah Cadika Lassang Barat terdapat jalanan yang sangat perlu perbaikan dengan melihat kondisi jalanan yang sudah rusak parah. Terkait dengan responsibilitas peneliti kemudian mewawancarai salah satu masyarakat yang kebetulan tinggal di daerah Cadika Lassang Barat.

“ jalanan yang ada di daerah ini sebenarnya sudah sangat lama dengan kondisi yang sangat parah, kerusakan dimana-mana. Sebagai masyarakat bukan

hanya saya yang merasa kurang nyaman ketika melewati jalan yang ada di Cadika Lassang Barat namun hampir seluruh masyarakat yang lewat di daerah jalanan yang rusak hampir mengeluhkan pihak dari pelaksana pemeliharaan jalan". (MS, 17 Agustus 2017).

Pernyataan informan sebelumnya menunjukkan bahwa apa yang dinyatakan oleh pelaksana pemelihara jalan dengan masyarakat memiliki perbedaan yang nyata. Peneliti juga melakukan observasi beberapa Jalanan di Cadika Lassang Barat dan menemukan jalan yang kerusakannya parah. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa responsibilitas dari pelaksana pemelihara jalan masih kurang dan inilah yang seharusnya menjadi perhatian dari pihak yang terkait dengan pelaksana pemelihara jalan beserta instansi yang terkait dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU). Pemeliharaan jalan dilakukan agar masyarakat bisa mendapatkan kenyamanan ketika melewati jalan tersebut namun pada kenyataannya jalanan di Cadika Lassang Barat masih memerlukan perbaikan agar masyarakat dapat merasa nyaman.

3. Dukungan Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program atau proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat lokal. Dukungan atau peran serta masyarakat dalam pembangunan pedesaan dapat di artikan sebagai aktualisasi dari ketersediaan dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program atau proyek masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Cadika Lassang Barat mengatakan bahwa:

”sebelum pembagunan jalan ini dilakukan memang telah ada pembicaraan awal dan tentu saja kai dari masyarakat sangat merespon dengan sanga baik. Apalagi ini mengenai perbaikan jalan, akan tetapi seiring berjalannya proyek tersebut terhenti. (MS, 16 Agustus 2017).

Pernyataan masyarakat diatas menjelaskan bahwa Pemeliharaan Jalan yang dilakukan pihak Dinas Pekerjaan Umum tidak terlaksana sesuai dengan apa yang telah disepakati sebelumnya. Dimana pada pembicaraan awal mereka akan melaksanakan perbaikan jalan di seluruh jalan Cadika Lassang Barat namun pada kenyataannya mereka hanya melakukan sebagian dari tugasnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian secara umum aktivitas pemeliharaan jalan Kabupaten Takalar telah dilaksanakan namun masih belum maksimal dan dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak hambatan. Sehingga hasil yang diharapkan belum bisa tercapai secara penuh.
2. Berdasarkan hasil di lapangan faktor dominan yang menghambat tercapainya tujuan terletak pada minimnya sumber daya manusia yang dimiliki, manajemen waktu tahun anggaran yang tidak terintegrasi dengan kondisi di lapangan. Namun dibalik itu sebagian masyarakat menganggap bahwa pemerintah setempat telah menunjukkan respon yang cukup maksimal dalam pemeliharaan jalan di Kabupaten Takalar. Dukungan masyarakat pulalah yang menjadi motivasi bagi pemerintah setempat.

B. SARAN

1. Perlu adanya peningkatan pengawasan internal sebagai upaya untuk mengontrol pelaksanaan kebijakan tersebut melalui mitra dari pelaksana kebijakan di lapangan supaya sesuai dengan apa yang telah direncanakan.
2. Sebaiknya waktu pelaksanaan kebijakan tersebut dialihkan pada jam-jam yang tidak padat lalu lintas sehingga pihak masyarakat, polantas, dan pelaksana di lapangan nyaman untuk melaksanakan pemeliharaan jalan. Serta meningkatkan intensitas koordinasi dari pihak pelaksana kebijakan dengan polantas untuk mengkondisikan lapangan agar kondusif

3. Mengoptimalkan lagi kinerja yang telah dilakukan serta harus disertai pemantauan rutin yang dilakukan oleh pemerintah kota, jadi tidak harus menunggu adanya laporan dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkin, Marvin C. 1969. *Evaluation Theory Development, UCLA CSE Evaluation Comment, Center For The Study Of Evaluation, Vol.2, No.1*. University Of California, Los Angeles.
- Arikunto, Suharsimi. 1999. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Ed. Rev. IV. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Arthur, Wignall. 1999. *Proyek Jalan: Teori dan Praktek*. Jakarta: Penerbi Erlangga.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington D.C: Congressional Quartelly Inc.
- Gulo, W. 2002. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Grasindo
- Handayaniingrat, Soewarno, 2002. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta
- Jeddawi, Murtir. 2008. *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah (Analisis Kewenangan, Kelembagaan, Manajemen, Kepegawaian dan Peraturan Daerah)*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Kartasmita, Ginanjar, 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo.
- Moekijat, 1998. *Analisis Jabatan*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Norman E. Gronlund, 1985. *Pengukuran dan Evaluasi Dalam Pengajaran*. New York : McMillan Publishing.
- Salim, Mahmud. 2002. *Rencana Pemeliharaan Jalan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Saodang, Hamirham, 2004. *Konstruksi Jalan Raya*, Nova: Bandung
- Siagian, P. 1999. *Administrasi Pembangunan*. PT Bumi Aksara, Taruna Grafica. Jakarta
- Soleh, Chabi, 1999. *Asas-asas Manajemen*.
- Stufflebeam, Daniel L. dan Dhinkfield, Anthony J. 2007. *Evaluation Theory, Models, and Application*. San Fransisco: Jossey-Bass.
- Sugiono, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiono, 2001. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, iman, 1995. *Manajemen Proyek*, Jakarta: Erlangga.

- Sukirman, Silvia, 1999. *Perkerasan Lentur Jalan Raya*. Bandung: Nova.
- Tarijan, Rpbinson, 2008. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Bandung: Bumi Aksara.
- Tjokromidjoko, 1990. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. LP3ES. Jakarta
- Vis, W.C, dan kusuma, H, 1993. *Dasar-Dasar Perencanaan Beton Bertulang*. Jakarta: Erlangga.
- Wikipedia, 2010. *Ensiloklopedia Bebas* (Pengertian Pembangunan Jalan). Kutipan dari Wikipedia.
- Zainal, Nining Haslinda, 2008. *Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi Pegawai Pada Sekretariat Pemerintah Kota Makassar*. Makassar: FISIPOL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 Tentang Standar Peayanan Minimal.
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

WEBSITE

- Anonim, 2016. *Kondisi Jalan Poros Gowa-Takalar di Polongbangkeng Utara*, Makassar. Tribun Takalar.com

JURNAL

1990. *Jurnal Tata Cara Penyusunan Program Pemeliharaan Jalan Kota*. Jenderal Bina Marga dan Direktorat Pembinaan Jalan Kota.
1990. *Tata Cara Pemeliharaan Jalan*. Direktorat Jendral Bina Marga, Jakarta.

Data Jalan Berdasarkan Kerusakan

No. Ruas	Nama Ruas		Kecamatan Yang Dilalui	Panjang Ruas (Km)	Lebar Ruas (m)
	Pangkal	Ujung			
7	Latang	Malolo	Polombangkeng Utara	6,37	4,5
11	Panjojo	Lassang	Polombangkeng Utara	6,3	5
632	Paraikatte	Bendungan Bissua	Polombangkeng Utara	4,63	4,5
683	Je'ne Lembaya	Karungpatodo	Polombangkeng Utara	2,96	4
3	Bajeng	Sombala Bella	Pattalassang	2,51	4
5	Solonga	Tamasongo	Pattalassang	4,55	4
417	Jl. Panaikang Bt. Rappo		Pattalassang	2,46	4
419	Jl. Bajeng Raya		Pattalassang	4,46	4
636	Jl. Tisi Effendi		Pattalassang	1,32	3,5
682	Jl. Lingkungan Pappa I		Pattalassang	0,76	3

Sumber: Kepala Bidang Tata Usaha Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Krisdayanti, lahir di Samarinda, Kalimantan Barat, pada tanggal 23 Maret 1995. Anak Bungsu dari pasangan Alm. Alimuddin dan Nursida Razak. Penulis mulai memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2001 di SD 43 Bontopedda dan tamat pada tahun 2007 di Kabupaten Sinjai. Tahun 2007, penulis melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nahdiyat Makassar, dan tamat pada tahun 2010. Pada tahun 2010 penulis melanjutkan pendidikannya di SMK Plus Indonesia Timur Makassar dan tamat pada tahun 2013. Tahun 2013, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar dan akan menyelesaikan masa perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul skripsi : **“Evaluasi dan Pelaporan Pemeliharaan Jalan di Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Takalar”**